

# **LARANGAN OLIGARKI EKONOMI DALAM AL-QUR'AN**

**Skripsi:**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

**MARTINO EKO JAYANA PUTRA**

**E93215071**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya.

NAMA : Martino Eko Jayana Putra

NIM : E93215071

JURUSAN : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini saya sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Martino Eko Jayana Putra

E93215071

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Martino Eko Jayana Putra ini telah disetujui untuk diujikan,

Surabaya, 19 Desember 2019

### Pembimbing I



Purwanto, MHI

197804172009011009

### Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

197604162005011004

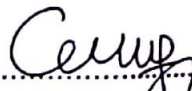
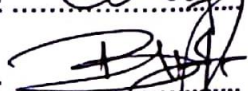

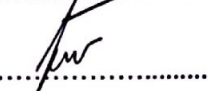
## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Larangan Oligarki Ekonomi dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh

Martino Eko Jayana Putra ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 30

Desember 2019

Tim Penguji:

1. Purwanto, MHI (Ketua) : 
2. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I (Sekretaris) : 
3. Drs. H. M. Syarief, M.H (Penguji I) : 
4. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI (Penguji II) : 

Surabaya, 30 Desember 2019



Dekan,  
Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARTINO EKO JAYANA PUTRA .....  
NIM : E93215071 .....  
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU ALQURAN DAN TAFSIR .....  
E-mail address : [martinjayana3@gmail.com](mailto:martinjayana3@gmail.com) .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**LARANGAN OLIGARKI EKONOMI DALAM ALQURAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Januari 2020

Penulis

(Martino Eko Jayana Putra)













































kondisi sosial politik. Kedua, adanya motif dari oligarki Tubagus Chaeri Wardana untuk menambah akumulasi pendapatan kekayaan yang bersumber dari APBD Kota Tangerang.

Kedua, Rafli Zulfikar dalam skripsinya yang berjudul *Kompleksitas Kekuasaan Oligarki Dalam Proses Demokrasi Di Filipina* tahun 2014 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember. Skripsi ini berisi tentang bentuk dan mekanisme bekerjanya oligarki di era demokrasi.

Ketiga, buku berjudul *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, dengan nama peneliti Vendi R Hadiz. Di dalam buku terdapat bagian yang memuat penelitian dengan judul *Kekuasaan dan Politik di Sumatera Utara: Reformasi Yang Tidak Tuntas*. Penelitian ini dilakukan oleh Vendi R Hadiz di Sumatera Utara pada tahun 2012 menggunakan metodologi kualitatif, dengan teori dan konsep, diantaranya patron-klien, transisi demokrasi, dan *good governance*. Buku ini menjelaskan perubahan kekuasaan ekonomi politik di Indonesia paska Soeharta, yang menfokuskan kekuasaan ekonomi politiknya di daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk membuat skripsi ini adalah kajian kepustakaan / *library research*, maka pengumpulan sumber data sebagai referensi dan dokumentasi melalui telaah buku-buku atau artikel-artikel yang



















Dengan demikian, sesuatu kekuasaan oligarki harus di dasarkan oleh dua dimensi diatas. Kekuasaan yang harus mempunyai jangkauan dan jaringan yang harus sistematis dan sulit untuk dipecahkan. Winters melihat oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan antar aktor yang memiliki sumber daya material berlimpah. Winters menitikberatkan analisisnya pada sejumlah individu yang terkandung bertindak kolektif, tetapi sering kali juga tidak bertindak kolektif dalam upayanya mempertahankan kekayaan.

Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, mereka menfokuskan pembahasan kepada sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan mekuatnya hubungan antara negara dan kaum borjuis yang ditandai oleh perpaduan akumulasi antara kekayaan ekonomi dan kekuasaan politik.

George Aditjondro memberikan penjabaran yang cukup jelas dalam konteks di Indonesia. Mengenai pembasan bagaimana bentuk dan bekerjanya sistem politik di Indonesia selama kekuasaan Orde Baru. Menurutnya praktik kekuasaan oligarki berarti praktik kekuasaan oleh presiden, dan semua orang yang terikat oleh presiden baik laki-laki maupun perempuan.<sup>38</sup> Istilah yang lebih sering didengar tentang hal ini adalah koncoisme.

Oligarki Presiden Soeharto, menurut George Aditjondro, adalah sebuah sistem yang dibangun dengan hubungan keluarga dengan cara pernikahan dan penguasaan kelompok-kelompok kepentingan bisnis yang dirasa paling menguntungkan terhadap dirinya. Para pihak yang menjalin relasi tersebut di

---

<sup>38</sup>George Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan: Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2007) 1.



















Pada konteks ketika suatu negara telah menerapkan hukum yang kuat dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi warganya dari legitimisasi monopoli oligark, maka negara tersebut yang menjadi masalah atau tantangan bagi oligark itu. Karena negara akan meminta bayaran berupa pajak atas kekayaan yang dimiliki masyarakatnya. Kondisi negara yang seperti ini kemudian membuat oligark bergeser tujuan yang mana awalnya ingin memperbanyak kekayaan menjadi mempertahankan pendapatan.

Oligark demi mencapai pertahanan pendapatan, oligark tidak melakukannya sendiri melainkan rela untuk menyewa jasa konsultan demi terhindar dari penegakkan hukum negara yang mengambil sebagian kekayaan oligark (pajak) . Oligark berusaha mempertahankan pendapatan dengan menggunakan sumber daya meteril bagi professional spesialis (pengacara, akuntan, konsultan penghindar pajak dan pelobi) dengan tujuan untuk tetap menjaga sebanyak-banyaknya harta dan pendapatan mereka agar tak jatuh ke tangan negara.

Dengan demikian, mengenai teori oligarki harus terlebih dahulu memahami apa pengertian oligarki dan oligark. Konsep pertahanan kekayaan mempunyai dua hal, pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Hal ini harus bahkan hukumnya wajib bagi oligark untuk mempertahankannya. Kemudian ada dua komponen dalam peristiwa oligark, oligark secara vertikal dan secara horizontal. Bilamana suatu negara memiliki hukum pencegahan oligarki pertahanan kekayaan menjadi satu-satunya strategi, oligark rela mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk menyewa jasa konsultan demi terhindar dari pajak.

#### 4. Tipe-tipe Oligarki

Oligarki dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe, setidaknya dapat digolongkan menurut tiga cirri utama: satu, sifat ancaman terhadap kekayaan yang datang dari luar. Kedua, kadar keterlibatan langsung oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas kekayaan. Ketiga, keterlibatan oligarki dalam kekuasaan atau pemerintah.

Berdasarkan ciri-ciri di atas terdapat empat tipologi oligarki: oligarki panglima, oligarki penguasa kolektif, oligarki sultanistik, dan oligarki sipil. Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*) terjadi ketika klaim atas wilayah sumber kekayaan saling tumpah tindih, karena tidak ada otoritas yang bisa mengatur masalah penegakan atas klaim kekayaan. Otoritas yang mengatur klaim kekayaan biasanya tidak bertahan lama karena berasal dari kalangan oligark sendiri yang dilawan para oligark dengan senjata. Melalui sumber daya paksaan dan materil oligarki ini mengamankan kekayaannya dari ancaman pihak lain.

Oligarki Penguasa Kolektif (*Ruling Oligarchy*) adalah ketika para oligark masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Oligark ini membagi biaya kekuatan pemaksa, antara yang mereka bayar dan gunakan sendiri (terutama di pedesaan di luar ibu kota) dengan yang dibayar dan digunakan bersama oleh aparat setengah-negara yang mereka perintah langsung. Dalam oligarki penguasa kolektif, para oligark menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada kelompok oligark. Para oligark sebagai kelompok lebih kuat daripada hanya seorang diri oligark.



Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*), bentuk dari oligarki sultanistik ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu oligark, bukan negara terlembaga yang dibatasi hukum. Di dalamnya marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya.

Penegakan hukum, wewenang dan kekerasan hanya atau sebagian besar dikuasai penguasa, yang kesetabilan posisinya di puncak rezim, terutama di atas para oligark kuat yang ada di bawahnya sangat bergantung kepada penyediaan pertahanan harta dan pendapatan bagi para oligark secara keseluruhan.

Para oligark yang tak lagi bersenjata mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya materil mereka sebagai upeti kepada penguasa agar kekayaannya tidak dirampas. Ancaman harta terhadap sesama oligark dikelola secara strategis oleh penguasa sultanistik di atas. Penguasa juga mempertahankan kekayaan dan harta oligarki terhadap ancaman dari kaum miskin. Dalam oligarki sultanistik, mereka menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada suatu individu, yakni seorang yang lebih kuat.

Oligarki Sipil adalah oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tak berkuasa langsung. Bedanya dalam oligarki sipil, yang menggantikan individu tunggal sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan oligarki ada lembaga pelaku yang dikendalikan oleh hukum.

Bentuk oligarki sipil, para oligark menyerahkan sebagian besar kekuasaan mereka kepada pemerintah tak pribadi dan terlembaga di mana hukum lebih kuat daripada semua individu. Dengan tersedianya pertahanan harta oleh negara,































































































menjual gandum kepada kerajaan akan dicatat dan dikemudian hari dapat membelinya kembali di masa paceklik dengan harga normal.

Untuk menutupi divisit anggaran akibat pembangunan dan dana untuk membeli gandum dari rakyat, nabi Yusuf kemudian menerapkan kebalik kebijakan bayar pajak dimuka. Pengampunan pajak model nabi Yusuf itu adalah, bagi para bangsawan atau orang kaya yang membayar pajak satu tahun maka akan bebas pajak dua thun. Bagi yang membayar pajak dua tahun maka akan bebas pajak 4 tahun, bagi yang membayar pajak untuk tujuh tahun maka akan bebas pajak untuk 14 tahun berikutnya.

Ketika memasuki tujuh tahun masa paceklik, hanya tujuh lumbung yang dibangun oleh Nabi Yusuf untuk menyimpan gandum yang tidak membusuk. Gandum yang disimpan oleh para pendeta kuil Amun membusuk sebelum memasuki masa paceklik. Nabi Yusuf lalu mengeluarkan sejumlah paket kebijakan. Pertama, setiap budak tak dapat mengambil sendiri jatah gandum. Para majikan harus membeli gandum untuk menanggung hidup para budaknya. Kedua, budak yang sudah merdeka dan dapat membuktikannya dengan membawa surat merdeka dari tuannya, akan dianggap sebagai rakyat miskin, sehingga kerajaan akan memberikan jatah gandum gratis dan menyediakan pekerjaan yang layak kepadanya.

Ketiga, mereka yang hanya memiliki hewan ternak dan kehabisan uang dapat membayar gandum dengan hewan ternaknya. Keempat, para bangsawan dan orang kaya yang telah membayar pajak dapat membeli gandum dengan harga normal. Namun, bagi mereka yang tak mau membayar



















- 
- \_\_\_\_\_ *Metode Maudhu'i Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994.
- Fukuoka, Yuki. *Oligarchy and Democracy in Post-Soeharto*”, *Political Studi Review II*. Tk: Tp. 2013.
- George Ritzer dan DJ. Goodman. *Teori Sosiologi*. Terj. Nurhadi. Bantul : Kreasi Wacana. 2011.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Penelitian dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Grafindo Persada. 2000.
- Hardiman, Budi. *Dalam Moncong Oligarki; Skandal demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Hdiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Terj, A Zaim Rofiqi dan Dahris Setiawan. Jakarta: LP3ES. 2005.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Hoffman, John. *A Glossary of Political Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2007.
- Ibnu Asyūr, Muhammad Ṭāhir. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tk: Tp. Tt.
- Johnson, Doyle Paule. *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approac*. New York: Springer. 2008.
- Lenin, Vladimir. *NEGARA DAN REVOLUSI*. Moskow: Zyizn I Znaniye. 1917.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah – An-Nas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

- al-Marāghī, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsīr al-Marāghī*. Terj. M. Thalib. Yogyakarta: Sumber Ilmu. 1986.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Moti, Haris Rusly. *Rute Kenabian Yusuf; Resesi Ekonomi dan Kisah Keruntuhan Oligarki*. <https://rmol.id/>. diakses 28 Oktober 2018.
- Muhammad Abdurrokhim dkk. *Manifesto Perjuangan Rakyat*. Surabaya: Aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat Publiser. 2019.
- Mujib, Abd. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Nasir, Syed Mahmudun. *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Prasetyo, Eko. *Kitab Pembebasan: Tafsir Progresif Atas Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Intrans Publiser. 2013.
- al-Qurtūbī, Muhammad bin Ahmad. *al-Jāmi' li al-Ahkām al-Qur'an*. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah. 1964.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*. Terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Rahman, Fazlur. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy. 2000.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan. 1999.

- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Richard Robinson dan Vedi R Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets*. London: Routledge Curzon. 2004.
- Ridho, Muhammad. *Oligarki dan Agensi Politik Indonesia di Era Neoliberal: Evaluasi Kritis Tesis Oligarki Robison-Hadiz*. Jurnar Indoprogres No. 6 Vol. II. 2016.
- Robinson, Richard. *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Terj, Harsutejo. Jakarta: Komunitas Bambu. 2012.
- Sahara, Dedi. *Jokowi dan Kepentingan Oligarki dalam Serangkaian Revisi Undang-Undang*. <https://islami.co/>. diakses 28 Oktober 2019.
- Samsuddin, Haris. *Demokrasi Oligarki Bukan Demokrasi Kebablasan*. <https://indoprogres.com>. diakses 29 Oktober 2019.
- Setyawan, Dharma. *Sexy Killers, Batu Bara dan Oligarki*, <https://indoprogres.com/>. diakses 24 Desember 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013), 385.
- \_\_\_\_\_ *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1992.
- \_\_\_\_\_ *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sulhin, Iqraq. *Masyarakat Kapitalis, Oligarki dan Kejahatan*. dalam Seminar “Satu FISIP Talk, AJS FISIP UI Depok”. Senin 3 November 2014.
- al-Syaukānī. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 2004.

